

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 di jelaskan bawah pendidikan adalah usaha mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, Pengendalian diri, Kepribadian, Kecerdasaan, Akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pendidikan, secara substansial, dapat didefinisikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh individu untuk menstimulasi dan mengembangkan potensi yang melekat pada dirinya, baik dalam aspek fisik maupun mental, dengan merujuk pada norma dan nilai-nilai yang mengatur interaksi sosialnya.²

Perkembangan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, terutama dalam hal kurikulum. Sejak pengenalan konsep kurikulum pada tahun 1947, telah terjadi sejumlah perubahan yang signifikan hingga mencapai tahap pengembangan yang ditandai dengan diterapkannya model Kurikulum 2013. Namun, dalam perkembangan terbaru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyetujui penerapan Kurikulum Merdeka sebagai langkah terbaru yang menggantikan peran Kurikulum 2013. Langkah ini menandai upaya terbaru dalam mengembangkan kerangka kurikulum

¹ Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Naional*” Pasal 1 ayat 1, (Jakarta : Sekretaris Negara) 3.

² Munirah, “Sistem Pendidikan di Indonesia: Antara Keinginan dan Realita”. *Jurnal Auladuna*, Vol.2, No.2, 2019, 234.

di Indonesia. Menurut rencana, pada tahun 2024, Kurikulum Merdeka dijadwalkan untuk diterapkan sebagai standar kurikulum nasional, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaharui pendekatan pendidikan secara menyeluruh. Kurikulum Merdeka mengusung konsep yang menekankan pada pendekatan yang mengutamakan bakat dan minat individu dalam proses pembelajaran. Meskipun terjadi perubahan dalam kurikulum, tujuan utamanya tetap tidak berubah, yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari kurikulum sebelumnya. Setiap penyesuaian dalam kurikulum mencerminkan kebijakan yang telah diatur oleh lembaga terkait, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di Indonesia.³

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Anwar Makarim, telah mengumumkan suatu kebijakan reformasi pendidikan yang dikenal dengan istilah "merdeka belajar". Langkah ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian dalam proses pembelajaran. Kebijakan ini menandai sebuah langkah signifikan dalam upaya penyempurnaan sistem pendidikan, dengan memunculkan beragam inisiatif, seperti pengembangan kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Pengumuman awal mengenai perubahan ini dilakukan pada episode kelima belas pada tanggal 11 Februari 2022.

Dengan pemberlakuan secara resmi kurikulum merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini menawarkan tiga model kurikulum yang berbeda. Ketiga model tersebut pada dasarnya merujuk pada standar nasional pendidikan,

³ Ineu Sumarsih, "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu*, Vol 6, No 5, 2022, 8249.

namun dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda di berbagai institusi pendidikan. Model-model tersebut, yakni Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka, memberikan fleksibilitas yang besar bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal serta keinginan pembelajaran yang ada dalam masyarakat.⁴

Individu yang telah menjalani pendidikan diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam lingkungan sosialnya. Sebagai individu yang terdidik, kita diharapkan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menyatu dengan masyarakat secara efektif. Seseorang yang telah mendapat pendidikan sepatutnya memiliki kapasitas untuk menjadi agen perubahan yang berpengaruh dalam lingkungannya, bukan hanya menjadi bagian yang tak diperhatikan dari masyarakat tanpa usaha yang nyata untuk mengarahkan perubahan yang positif. Kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam masyarakat merupakan suatu yang ditekankan dalam ajaran Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-'Alaq/96: 1-5.

إفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۙ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ ٢ افْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! 2. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, 4. yang mengajar (manusia) dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

⁴ Kementiran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Tentang Kurikulum Merdeka", 2022,10.

Al-Maraghi dalam interpretasinya terhadap ayat tersebut mengindikasikan bahwa ayat tersebut memberikan panduan kepada individu yang telah memperoleh kebenaran tentang Allah SWT dan Nabi-Nya untuk bersikap lapang dada dalam pertemuan dengan Rasulullah dan dalam situasi perang. Sebagai hasilnya, jika individu-individu tersebut melaksanakan tindakan tersebut, mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah di kehidupan akhirat dengan diterimanya mereka ke dalam surga. Berdasarkan penafsiran yang dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan tentang "majelis" menurut pandangan Al-Maraghi mungkin merujuk pada berbagai konteks, seperti tempat di mana Rasulullah memberikan pengajaran agama kepada pengikutnya, forum diskusi yang mendalam tentang aspek-aspek keagamaan, atau bahkan ruang di mana persiapan untuk situasi konflik bersenjata dibicarakan dan disiapkan bersama para sahabat Nabi.⁵

Dari ayat yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi beragam permasalahan kehidupan, manusia membutuhkan pengetahuan yang luas sebagai bekal utama. Ketersediaan pengetahuan yang komprehensif akan menjadi pondasi penting dalam menavigasi kompleksitas kehidupan di dunia ini. Perolehan pengetahuan dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan.

Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa perubahan dalam pendidikan tidaklah hanya dapat dicapai melalui pendekatan administratif semata, namun juga harus melibatkan perubahan dalam budaya pendidikan.

⁵ Ahmad Syakir, Syaikh. Mukhtashar Tafsir Tahlili, Jakarta : Darus Sunnah Press, Jilid 1, Cet. 2. (2014) 4.

Pernyataan tersebut konsisten dengan pandangan yang dinyatakan oleh Sibagariang dan rekan-rekannya, yang menggaris bawahi bahwa konsep merdeka belajar memiliki potensi untuk menjadi elemen yang penting dalam visi dan misi masa depan pendidikan Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk membentuk individu-individu yang dilengkapi dengan kualitas serta kapabilitas yang diperlukan agar mampu bersaing secara efektif dalam beragam bidang pendidikan. Hal ini menegaskan usaha untuk menghasilkan siswa yang dapat menyesuaikan diri dan berhasil dalam konteks pendidikan yang beragam. Konsistensi dalam perspektif ini menunjukkan bahwa penerapan konsep merdeka belajar memiliki potensi untuk menghasilkan dampak yang positif dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ini menandakan bahwa pendekatan merdeka belajar mungkin menjadi kunci dalam merancang sistem pendidikan yang lebih efektif dan progresif di masa yang akan datang.⁶

Antisipasi terhadap penerapan kurikulum merdeka memproyeksikan penyediaan fasilitas yang mendukung kemajuan siswa sejalan dengan potensi serta bakat unik yang dimiliki oleh tiap individu. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan peserta didik secara holistik, mengakui beragam bakat dan kapasitas mereka dalam proses pembelajaran, serta memberikan penghargaan yang lebih komprehensif terhadap keragaman individu dalam ranah pendidikan. Kurikulum merdeka disusun sebagai suatu strategi pembelajaran yang menekankan pentingnya aspek kritisitas, pencapaian mutu yang

⁶ Dahlia Sibagariang, dkk, "Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia", *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Vol. 14, no.2, 2021, 91.

optimal, aplikabilitas yang luas, variasi dalam pendekatan, dan progresivitas dalam pengembangan kurikulum. Implementasi model kurikulum yang baru ini memerlukan kerjasama yang erat, komitmen yang teguh, tekad yang kokoh, serta langkah-langkah konkret dari semua pihak agar nilai-nilai Pancasila dapat terakar secara mendalam dalam proses pendidikan siswa.⁷

Kurikulum Merdeka menekankan prinsip kebebasan dan menyoroti peran aktif siswa, guru, dan institusi pendidikan dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat. Berbeda dengan pendekatan Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka mengusung konsep "Merdeka Belajar", yang memberikan kesempatan bagi institusi pendidikan, pendidik, dan pelajar untuk melakukan eksperimen, belajar secara mandiri, dan mengembangkan kreativitas mereka. Pendekatan ini tidak lagi fokus pada pencapaian standar minimum, melainkan menekankan peningkatan kualitas pembelajaran untuk membentuk individu siswa yang berkualitas. Mereka diharapkan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki keterampilan yang cukup sebagai bagian penting dari sumber daya manusia Indonesia yang siap menghadapi tantangan global.⁸

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan wali kelas kelas IV di Min 9 Banjar mengenai penerapan Kurikulum Merdeka, ditemukan bahwa para pengajar menghadapi beberapa kendala. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kurangnya pengalaman dalam menerapkan prinsip Kurikulum Merdeka Belajar, keterbatasan sumber referensi yang membuat sulit bagi mereka untuk menemukan materi

⁷ Restu Rahayu, dkk., "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak", *Jurnal Basicedu*, Vol.6, No.4, 2022, 2.

⁸ Dewi Rahmahdayanti dan Agung Hartoyo, "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar", *Jurnal Basicedu*, Vol 6, No 4, 2022, 4.

pelajaran dan menerapkannya, serta kesulitan dalam memilih materi pelajaran yang sesuai. Di Min 9 Banjar, penerapan Kurikulum Merdeka mengalami beberapa modifikasi, terutama dalam konteks sistem pembelajaran. Para pengajar diberdayakan dengan wewenang untuk memilih dari berbagai alat bantu pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing siswa. Ini menunjukkan penekanan pada fleksibilitas dan adaptabilitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Perlu ditekankan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar baru diperkenalkan belakangan ini di Indonesia, yaitu pada tahun pelajaran 2021/2022, dan belum semua institusi pendidikan telah menerapkannya. Oleh karena itu, informasi mengenai kurikulum ini masih terbatas, terutama di tingkat pendidikan dasar. Meskipun diharapkan bahwa dengan pendekatan baru ini, sebagian besar pengajar akan lebih mampu menciptakan pendekatan pengajaran yang kreatif dan inovatif, namun banyak di antara mereka masih merasa kurang yakin. Mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk menguasai materi pembelajaran dengan baik dan mendalam guna mengemasnya secara menarik dan menghibur bagi para siswa. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila berperan sebagai pedoman utama dalam menetapkan arah pendidikan di Indonesia, termasuk dalam penyusunan kurikulum, implementasi program, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan proses penilaian. Namun, implementasi konsep ini juga menimbulkan kebingungan bagi para guru dan memperkuat kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang profil Pancasila.

Dengan mengacu pada masalah-masalah tersebut, penelitian akan dilakukan untuk membahas “Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Di Kelas IV MIN 9 BANJAR.” Untuk mengetahui permasalahan sekaligus upaya yang dilakukan pendidik dalam menerapkan Kurikulum Merdeka di MIN 9 BANJAR.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka di kelas IV MIN 9 Banjar. Mendapatkan jawaban pada fokus penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan kurikulum merdeka belajar kelas IV di MIN 9 BANJAR?
2. Apa saja Problematika penerapan kurikulum merdeka belajar kelas IV MIN 9 BANJAR?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi Problematika penerapan kurikulum merdeka kelas IV MIN 9 BANJAR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses penerapan kurikulum merdeka kelas IV di Min 9 Banjar.
2. Mengidentifikasi apa saja problematika yang di hadapi oleh guru dalam penerapan kurikulum merdeka kelas IV di Min 9 Banjar.
3. Mengatahui uapaya yang di lakukan oleh guru dalam menghadapi problematika penerapan kurikulum merdeka kelas IV di Min 9 Banjar.

D. Definisi Operasional

1. Problematika

Problematika bermula dari istilah "problem", yang mengacu pada keadaan atau situasi yang menghasilkan tantangan atau kesulitan. Konseptualisasi ini mencakup berbagai situasi atau hambatan yang memerlukan solusi, menganggap masalah sebagai ketidakcocokan antara realitas yang ada dengan harapan yang diinginkan, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "problematika" merujuk pada kondisi yang masih memiliki masalah atau aspek yang belum sepenuhnya terselesaikan secara memadai.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa problematika merujuk pada sejumlah permasalahan atau isu yang masih belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga dapat menghambat proses pencapaian tujuan dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal.

2. Penerapan

Penerapan merujuk pada tindakan menerapkan konsep atau prinsip dalam konteks praktis. beberapa ahli menyatakan bahwa konsep penerapan melibatkan tahap dimana suatu kelompok atau golongan mengadopsi teori, metode, atau aspek lainnya dengan tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya untuk kepentingan yang telah ditetapkan.

⁹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

3. Kurikulum Merdeka

Problematika bermula dari istilah "problem", yang mengacu pada keadaan atau situasi yang menghasilkan tantangan atau kesulitan. Konseptualisasi ini mencakup berbagai situasi atau hambatan yang memerlukan solusi, menganggap masalah sebagai ketidakcocokan antara realitas yang ada dengan harapan yang diinginkan, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "problematika" merujuk pada kondisi yang masih memiliki masalah atau aspek yang belum sepenuhnya terselesaikan secara memadai.¹⁰

Kurikulum Merdeka adalah sebuah bentuk kurikulum yang menyoroti keanekaragaman pembelajaran dalam kelas. Dalam lingkup kurikulum tersebut, materi disusun secara terperinci untuk memberikan siswa kesempatan yang memadai dalam memahami konsep secara mendalam dan mengembangkan keterampilan mereka dengan baik. Pengajar diberikan hak untuk memilih dari beragam jenis alat pembelajaran yang tersedia, memungkinkan adopsi pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu siswa secara pribadi. Hal ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam

¹⁰ Madhakomala, dkk, "Kurikulum Merdeka Dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Paulo Freire", *Jurnal At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, Vol.8, No. 2, 2022,165.

merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik dan preferensi individu.¹¹

Jadi Kurikulum dapat di simpulkan bahwa suatu rencana atau rancangan pedoman di dalam setiap lembaga untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran.

¹¹ Kemendikbud_RI, *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 9.

E. Signifikansi Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan sumbangan penting terhadap pengetahuan yang telah ada, memperluas domain ilmu, dan kemungkinan menghasilkan ide-ide baru dalam lingkup kegiatan akademik, khususnya dalam konteks tantangan yang terkait dengan penerapan Kurikulum Merdeka di lingkungan kelas.

2. Signifikansi Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan dari hasil penelitian ini adalah untuk menyumbangkan pengetahuan dan pemahaman baru bagi peneliti yang juga merupakan calon pendidik di masa depan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas persiapan mereka sebagai pendidik di masa mendatang. Temuan ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah terkait implementasi kurikulum merdeka.

b. Bagi Pendidik

Harapan dari hal tersebut adalah agar dapat berfungsi sebagai pedoman yang bermanfaat dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, dengan tujuan mencapai hasil belajar yang optimal.

c. Bagi Sekolah

Harapannya, penelitian ini dapat membangkitkan semangat inovasi dan memberikan dorongan kepada para pendidik untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menyampaikan materi di kelas. Dengan demikian, diharapkan guru akan semakin terampil dalam merencanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam konteks topik yang dipelajari oleh peneliti dalam penelitian ini, penting untuk didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji isu serupa.

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Review Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Meisin meneliti tentang Problematika guru dalam Menerapkan kurikulum merdeka belajar ¹²	Perbedaannya, terdapat pada lokasi penelitian dan kelas, penulis memilih kelas IV di Min 9 Banjar. Sedangkan penelitian Meisin Siswa kelas I dan IV di SDN 17 Rejang lebong.	Sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif

¹² Meisin, Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Siswa Kelas I dan IV di SDN Rejang lebong, Skripsi: Insitut Agama Islam Negeri cucup, 2022, 20.

2	Siti Nur Afifah meneliti tentang Problematika penerapan kurikulum merdeka dalam ¹³ mata pelajaran Agama Islam	Perbedaannya, Peneliti yang dilakukan penulis ada dilingkungan sekolah dasar. Sedangkan penelitian Siti Nur Afifah meneliti pada mata pelajaran PAI yang di fokuskan pada kurikulum di SMP	Sama-sama Tentang problematika penerapan kurikulum merdeka
3	Atika Widyastutik, 2020, Persepsi guru tentang konsep merdeka belajar Mendikbud makarim dalam pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 3 sleman ¹⁴	Perbedaan terletak pada fokus penelitian sebelumnya yang mempertimbangkan pandangan guru terhadap gagasan Kurikulum Merdeka Belajar melalui platform daring, sementara penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi masalah yang timbul dalam penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah MIN 9 Banjar.	Keduanya mengulas mengenai Kurikulum Merdeka dengan metode penelitian kualitatif.

¹³ Siti Nur Afifah, Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Smp Deltasari, Sidoarjo, Skripsi (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2022), 30.

¹⁴ Atika Widyastuti, Persepsi Guru Tentang Konsep Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 3 Sleman, 2020, 10.

G. Sistematika Penulisan

1. Bagian pertama, Bab I, berperan sebagai pengantar yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan, relevansi, tinjauan literatur, definisi operasional, dan struktur penulisan karya ilmiah.
2. Bagian kedua, Bab II, merupakan bagian yang membahas landasan teori, mencakup review literatur dari sumber-sumber terpercaya, analisis konseptual, serta kerangka berpikir yang menjadi landasan penelitian.
3. Bagian ketiga, Bab III, merinci tentang metodologi penelitian, termasuk desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan, serta lokasi pelaksanaan penelitian.
4. Bab IV, bagian berikutnya, memuat hasil penelitian beserta analisisnya, yang mencakup temuan dari penelitian dan evaluasi yang komprehensif terhadap temuan tersebut.
5. Bab V, bab penutup, memuat kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi untuk pengembangan penelitian di masa depan.